



## Pendahuluan

Laut adalah sebuah tempat manusia tidak dapat melakukan apapun tanpa ada alat bantu, dimana jenis wilayah ini merupakan sebuah genangan air yang sangat luas. Wilayah laut di Bumi mencapai 70% sedangkan dataran hanya 30%, perbandingan yang sangat besar diantara kedua wilayah itu. Manusia dari zaman batu sudah menjajah laut dikarenakan banyaknya sumber makanan yang berada disana. Dan hal ini sudah dilakukan dari zaman Paelolitikum atau zaman batu tua, yang merupakan zaman dimana manusia masih tidak berada disatu tempat dalam jangka lama atau nomaden.

Semakin berkembangnya zaman, manusia pun mulai bisa melakukan ekspansi laut yang lebih luas dimana semakin berkembangnya alat transportasi laut dan alat untuk menangkap maka semakin banyak yang melakukannya. Efek domino dari hal ini adalah semakin banyak manusia yang berkumpul disekitaran pantai yang menyebabkan juga banyaknya manusia yang menetap yang dapat menyebabkan munculnya kota. Seperti magnet kota pinggir pantai pun akan didatangi oleh para pedagang dan masyarakat yang ingin mencari makan.

Munculnya kota dan semakin banyaknya masyarakat yang datang kesana menjadikan kota pinggir pantai menjadi sebuah kota vital. Kota pinggir pantai sering menjadi tempat perdagangan terjadi dan banyak pelancong dari berbagai tempat untuk datang. Maka dari itu kebanyakan kota pada zaman dahulu yang berada dipinggir pantai memiliki kapal-kapal laut yang kuat. Seperti kota-kota pesisir Eropa dimana mereka memiliki kekuatan militer laut yang sangat kuat untuk mengamankan jalur perdagangan dari serangan-serangan perompak dan kerajaan lain dikarenakan pada saat itu banyak negara Eropa memiliki negara jajahan yang dibatasi dengan laut. Untuk mengirimkan sumber daya itu diperlukannya banyak kapal dan hal ini menjadi sasaran emas perompak.

Dalam konteks hubungan internasional, laut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemisah teritori negara, melainkan sebagai *global commons* yang memiliki nilai strategis, ekonomi, dan politik yang sangat tinggi. Konsep *global commons* merujuk pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang pemanfaatannya bersifat kolektif dan berdampak langsung terhadap stabilitas sistem internasional. Dalam kajian



global (ASEAN, 2023; Kementerian Pertahanan RI, 2021). Relevansi laut dalam ekonomi global kontemporer juga menegaskan bahwa laut termasuk dari *Blue Economy*, ruang diplomasi, serta arena kompetisi dan kerja sama internasional yang saling berkelindan (Bueger, 2021).

Indonesia sebagai negara maritime sudah memiliki sejarah yang sangat kental dengan laut dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang mayoritas merupakan pulau-pulau yang terpisah. Dimulai dari kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan kerajaan Islam, laut menjadi faktor penting kerajaan dalam menjaga dan menaklukkan musuh mereka. Pada saat Indonesia modern, perbatasan laut sangat digembor-gemborkan pada awal negara Indonesia terbentuk karena laut memiliki peran yang sangat hebat dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Dalam konteks inilah, gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memperoleh signifikansi strategis. Konsep ini tidak hanya menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim, tetapi juga mencerminkan upaya strategis untuk memosisikan Indonesia sebagai aktor sentral dalam menjaga stabilitas maritim kawasan dan

berkontribusi terhadap tata kelola laut global. Penguatan kekuatan laut, diplomasi maritim, serta kemampuan proyeksi kekuatan terbatas melalui instrumen angkatan laut dipahami sebagai respons kebijakan terhadap tantangan *global commons*, dinamika Indo-Pasifik, dan ketergantungan ekonomi global terhadap keamanan SLOC (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2022; Till, 2022).

### ***Naval Diplomacy***

Dalam praktik Hubungan Internasional, diplomasi tetap memegang peranan penting dalam geopolitik yang dinamis serta dinamika saling ketergantungan yang rumit (Mustika et al., 2024). Negara-negara di dunia masih mengandalkan diplomasi sebagai instrumen utama untuk mencapai keamanan nasional mereka (Ebegebulem & Adams, 2022). Dalam pengertian konvensional, diplomasi dipandang sebagai seni untuk memanfaatkan kecerdasan, peluang dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan antar negara melalui jalur non-konfrontatif (Mehmood & Khan, 2022).

Diplomasi didefinisikan sebagai profesi, aktivitas atau keterampilan dalam mengelola hubungan internasional, yang

biasanya dilakukan oleh perwakilan suatu negara di luar negeri (Berridge & James, 2003). Sementara itu, menurut Hart & Siniver (2020), diplomasi adalah seni dan praktik menyelenggarakan perundingan antar negara seperti dalam kasus penyelenggaraan perjanjian (traktat). Dengan demikian, diplomasi bagi negara adalah tentang urusan luar negeri, yaitu upaya untuk mengamankan dan memajukan kepentingan di luar batas-batas nasional melalui berbagai cara (Parasasti et al., 2023a).

Seperti yang kita pahami dalam pembahasan diatas, definisi tradisional diplomasi berfokus pada cara non-konflikual yang dilakukan oleh perwakilan negara. Namun, praktik diplomasi modern telah berkembang dan lebih dari negosiasi meja perundingan. Diplomasi juga mencakup penggunaan seluruh elemen kekuatan nasional (*national power*) untuk mengirimkan pesan dan memengaruhi negara lain (Heine, 2006). Dalam konteks inilah, kekuatan militer, yang secara historis dilihat sebagai antitesis dari diplomasi, yaitu alat perang, untuk menemukan peran baru di masa damai (Khadafi et al., 2023). Secara khusus, angkatan laut memiliki kapasitas unik untuk menjalankan fungsi diplomatik ini, yang

kemudian melahirkan sebuah konsep turunan, yaitu Diplomasi Maritim (*Naval Diplomacy*).

Chang (2018) menyatakan bahwa ND sebenarnya tidak memiliki definisi resmi atau baku, baik dalam Piagam PBB 1945 maupun dalam UNCLOS. Namun, gagasan tentang pentingnya diplomasi lewat kekuatan laut mulai dikenal ketika Liu Huaqing, mantan komandan Angkatan Laut Tiongkok, memperkenalkan strategi *coastal defence* pada tahun 1985. Pendekatan tersebut secara tidak langsung menegaskan pentingnya diplomasi angkatan laut sebagai bagian dari upaya negara untuk mengamankan kepentingan maritimnya (Harry et al., 2016).

Widen (2011) dalam studinya yang berjudul *naval diplomacy: a theoretical approach* menyatakan bahwa ND merupakan konsep yang lebih luas dan bersifat netral. Istilah ini umumnya mengacu pada pemanfaatan kekuatan laut sebagai alat politik di luar situasi perang. Bentuknya dapat berupa tindakan koersif yang melibatkan unsur militer laut. Seperti halnya Parasasti et al. (2023b) yang menegaskan bahwa di beberapa situasi, negara harus mampu mengelola kebijakan luar negerinya melalui pengerahan kekuatan laut secara



Merupakan kunjungan yang bersifat lebih diplomatik dan simbolis untuk memperkuat hubungan bilateral. Biasanya melibatkan interaksi dengan pejabat dan masyarakat setempat untuk membina citra positif dan membuka jalur komunikasi yang lebih luas.

*Naval Diplomacy* (ND) merupakan instrument vital dalam upaya untuk mengelola negara serta menjadi alat pencegah terjadinya perang. Melalui pendekatan diplomasi tersebut, sebuah negara dapat memberi sinyal kepada pihak lawan mengenai kebijakan dan kapabilitasnya, sehingga menghadirkan dinamika deterrence (pencegahan) dan compellence (pemaksaan terbatas). Diplomasi maritim menjadi sarana efektif untuk meredakan ketegangan dalam sistem internasional (Mehmood & Khan, 2022).

### **Penjelasan Kapal Induk**

*Aircraft Carrier* (Kapal Induk) dengan designasi CV (*Cruiser Veler*) adalah sebuah kapal perang yang diperlengkapi Geladak Pendaratan yang berfungsi sebagai pangkalan Pesawat

terbang dan sebagai sarana lepas landas dan pendaratan pesawat terbang

Kapal Induk dibuat pertama kali oleh Angkatan laut Austro-Hungaria di Venice bernama *SMS Vulcano* sebagai *Balloon Carrier*. *Balloon Carrier* adalah Kapal yang diperlengkapi dengan balloon yang diikat ke kapal dengan tali dan digunakan sebagai observasi terdepan Armada kapal atau konvoi. Kapal induk pembawa pesawat terbang amfibi pertama dibuat oleh angkatan laut Prancis dengan nama *La Foudre* dengan designasi *Seaplane Carrier* (AV). Armament *La Foudre* sebagai AV pertama di dunia tidaklah mengagumkan (Great), dengan batas tampungan 4 pesawat terbang amfibi, 8 meriam 3.9 Inchi SP, 4 meriam 65 MM SP, 4 senjata anti-pesawat 47 MM, dan armor baja setebal 4.6 inchi. (Hallion, 2001)

Saat perang dunia 1 dimulai, Inggris meluncurkan kapal induk modern pertama di dunia dengan nama HMS Ark Royal, Ark Royal dengan HMS Furious juga menjadi pioneer dalam penyerangan udara berbasis Kapal induk dan menjadi kapal induk pertama yang berhasil melakukan penyerangan udara dalam peperangan di Tondern saat Ark Royal dan Furious menyerang pangkalan Zeppelin Jerman di Tondern.





Hal ini membuat para pemikir kapitalis seperti Adam Smith dan David Ricardo melihat perang dan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat dalam dimana menurut mereka, sebuah kesuksesan dalam ekonomi bukan didalam bagaimana kamu bisa mengumpulkan kekayaan mu, tetapi mereka melihat bahwa pertukaran yang setara antar pelaku bisnis dan lancarnya sirkulasi uang menandakan bahwa perekonomian negara itu sukses. Dengan adanya perang, pemikir kapitalis melihat perang sangat mengganggu perekonomian negara dimana mereka melihat biaya perang sangat besar. Selain dengan pendanaan armada angkatan laut, negara juga terkena gangguan perdagangan internasional yang merupakan sebuah hal yang signifikan. (Adam Smith, 2005)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia singkatnya merupakan konsep aplikatif yang dimana terdiri dari lima pilar, antara lain:

- Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun

kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan.

- Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
- Indonesia sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.

Kelima aspek inilah yang disampaikan Presiden pada kunjungannya di dalam *East Asia Summit* 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar di samping menghadiri KTT ASEAN 2014 di tempat yang sama. (Agung Bimasyah Putra, 2022)

ahli sejarah dan ahli geostrategi Alfred Thayer Mahan, menulis sebuah buku berjudul "*The Influence Of Sea Power Upon History, 1660 – 1783*". Di dalam buku yang menginspirasi



Berbeda dengan konsep kekuatan darat dan kekuatan udara, yang konsep ini hanya digunakan pada istilah militer, kekuatan laut tidak bisa dilepas dari tujuan geo-ekonomik. Armada laut memang merupakan kekuatan laut, tetapi hal-hal seperti pengiriman barang melalui laut, operasi di pelabuhan, Sumber Daya dalam laut, oerikanan, dan semua bentuk komunikasi dan perdagangan termasuk sebagai kekuatan laut.

Julian S. Corbett berpendapat bahwa, negara harus melakukan kontrol terhadap lautan. Konsep kontrol ini berbeda dengan penguasaan terletak pada efektivitas sebuah negara dalam menerapkan fungsi penjagaan dan memastikan jalur perdagangan aman dari ancaman. Berbeda dari Alfred Thayer Mahan, konsep kontrol ini mempunyai 3 prinsip dasar yang dinamakan *Command of the sea*, yaitu :

- Komando pengaman terdiri dari pengambilan kebijakan dan keputusan blockade
- Komando konflik yang terdiri dari prinsip *Fleet in being*, kekuatan angkatan laut yang mempunyai pengaruh tanpa harus

meninggalkan pelabihan, dan *Counter-attack*

- Komando pelaksanaan, dimana angkatan laut harus siap dalam menghadapi invasi.

Indonesia tidak mengikuti cara Julian S. Corbett dikarenakan Indonesia telah menggunakan Sistem Komando Utama yang mencakup Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur yang mereka beroperasi sesuai wilayah yang dibagi. Sejauh ini yang dapat terlihat dari kekuatan militer Indonesia adalah konsep pertahanan manajemen lautnya yang masih dalam taraf *green water navy*. Atau angkatan laut yang secara umum hanya bertugas untuk mengontrol perairan-perairan Indonesia yang berada dalam garis-garis batas wilayah hingga batas terluar laut dangkal, wilayah kepulauan, dan pulau-pulau terluar dari suatu negara. (JMOL, 2014)

### **Kepemilikan Kapal Induk Oleh Indonesia, Diperlukan atau Tidak**

Sebagai negara maritime yang mempunyai wilayah air lebih besar daripada wilayah daratan, Indonesia memerlukan adanya armada laut yang mencukupi untuk melindungi wilayahnya. MEF atau *Minimum Essential Force* adalah sebuah proses modernisasi

alutista yang dimiliki Indonesia dimana target Indonesia adalah mendapatkan MEF yang berawal dari 2007 sampai 2024. Komponen utama yang dilihat ada tiga, yaitu Kekuatan, Persebaran, dan Kemampuan. Menurut Brigadir Jenderal Sisriadi, MEF Indonesia dibangun dengan dasar daya tembak, daya gerak, dan *Maneuver*. (Global Review, 2013)

Keunggulan Indonesia adalah dalam Kuantitas anggota TNI dimana Indonesia memiliki jumlah terbesar di Asia Tenggara sebanyak 584 penduduk per personil (Bakrie, 2007). Meski begitu, alutista Indonesia masih kurang mumpuni dimana kita bisa lihat masih kurangnya kendaraan-kendaraan yang bisa dipakai. Dapat dilihat Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 50 pesawat *multirole* untuk menjaga wilayah udara dan laut Indonesia. Kapal Indonesia sendiri mempunyai 5 Kapal Selam aktif yaitu 2 kelas Cakra dan 3 Kelas Nagapasa, diperkirakan Indonesia akan mempunyai total 8 kapal selam aktif. Pada kapal permukaan, Indonesia mempunyai 8 kapal Fregat dengan kelas 6 kelas Ahmad Yani, dan 2 Kapal Martadinata. 10 kapal Korvet yang terbagi menjadi 4 kelas Diponegoro, 3 kelas Bung Tomo, dan 3 kelas Fatahillah. Untuk kapal dengan fungsi sebagai *Anti-*

*Submarine Warfare* (ASW), Indonesia mempunyai 14 kapal dengan kelas Kapitan Pattimura. Untuk urusan menjaga hukum di perairan Indonesia, Indonesia mempunyai banyak kapal yang termasuk dalam Kapal Patroli dimana kapal-kapal ini mempunyai persenjataan yang memadai untuk melakukan fungsi mereka. Dikarenakan banyaknya dermaga dan pelabuhan dan wilayah yang perlu diamankan, kapal yang termasuk dalam kapal patrol mempunyai banyak varian dikarenakan TNI AL meminta pengembang kapal didalam negeri untuk membuatnya. Jumlah dari kapal patrol Indonesia mencapai 100 kapal dengan banyak jenis.

Indonesia pernah menjadi kekuatan maritime yang sangat disegani didunia pada masa nya yang ditugaskan pertama kali pada 24 Januari 1963, yaitu Kapal Irian. Kapal Irian adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov yang dibeli pada tahun 1962. Kapal ini menjadi kapal terbesar di belahan bumi selatan dimana pada masanya, Uni Soviet hanya pernah menjual 1 kapal sebesar kapal Sverdlov kepada Indonesia. Dimana negara lain tidak pernah berhasil membeli kapal-kapal Uni Soviet. Kapal Irian menjadi kapal *Flagship* atau kapal pemimpin Indonesia yang secara aktif digunakan

pada persiapan merebut Irian Barat dalam Operasi Trikora. Karena datangnya Kapal Irian, kehadiran kapal angkatan laut Kerajaan Belanda secara drastic berkurang dikarenakan kehadiran kapal Irian di perariran Irian Barat.

Dengan melihat sejarah dan melihat dengan trend Armada laut sekarang, Indonesia memerlukan kapal-kapal pemimpin untuk menjadi pusat operasi dalam melakukan pengamanan wilayah Indonesia. Kapal Induk menjadi salah satu pilihan dalam memasukan didalam Armada Indonesia. Kapal Induk diwilayah Asia tenggara masih mayoritas kapal-kapal milik Amerika dan Cina. Dengan melihat deklarasi Presiden Joko Widodo pada poin 1 dan 5, diperlukannya sebuah jenis kapal yang dapat menjadi symbol kekuatan armada laut. Kapal Induk adalah sebuah symbol kekuatan armada laut suatu negara yang menandakan bahwa armada laut negara itu sudah sangat mumpuni dalam menjaga wilayah mereka dan memiliki Sumber Daya yang banyak untuk digunakan armada laut untuk menguatkan wilayah mereka. Meski Indonesia memiliki banyak nya kepulauan yang dapat menjadi markas armada udara (dalam artian jenis

*Multirole* dan helicopter), Indonesia terapit oleh 2 Samudera besar dunia. Armada Udara tidak serta merta dapat menjaga seluas itu, dengan mempunyai kapal induk, Indonesia dapat melakukan pengamanan diwilayah samudera dan dapat menjadi pusat operasi dalam melakukan bantuan humaniter didalam maupun luar Indonesia. Selain itu, dengan adanya kapal induk diwilayah Asia Tenggara, konflik Laut Cina Selatan dalam kesetaraan kekuatan akan menjadi setara dengan Cina.

Dalam doktrin kekuatan laut modern, kapal induk dipahami bukan sebagai unit tempur tunggal, melainkan sebagai inti dari suatu sistem operasi terintegrasi yang dikenal sebagai *Carrier Strike Group* (CSG). CSG terdiri dari kapal induk sebagai pusat komando dan proyeksi kekuatan udara, yang didukung oleh kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam, serta unsur logistik. Konsep ini memungkinkan negara pemiliknya untuk melaksanakan proyeksi kekuatan lintas kawasan, menjaga kehadiran militer berkelanjutan, serta mengirimkan sinyal politik dan militer tanpa harus bergantung pada pangkalan darat (Till, 2022; IISS, 2023).

Selain fungsi tempur, CSG juga memainkan peran penting dalam operasi

non-perang seperti evakuasi warga negara, bantuan kemanusiaan dan bencana (*humanitarian assistance and disaster relief / HADR*), serta diplomasi angkatan laut. Dalam konteks ini, kapal induk berfungsi sebagai instrumen strategis yang menghubungkan kepentingan militer dengan tujuan diplomatik dan kebijakan luar negeri, khususnya dalam situasi krisis regional dan konflik intensitas rendah (Bateman, 2023; Hosoda, 2024).

Namun, perkembangan lingkungan strategis dan keterbatasan anggaran pertahanan mendorong munculnya alternatif terhadap kapal induk konvensional berukuran besar. *Light aircraft carrier* serta kapal jenis *Landing Helicopter Dock* (LHD) dan *Landing Helicopter Assault* (LHA) dipandang sebagai solusi yang lebih fleksibel dan ekonomis bagi negara-negara dengan kebutuhan pertahanan regional. Kapal-kapal ini tidak dirancang untuk dominasi laut global, tetapi mampu mendukung operasi amfibi, pengamanan maritim, serta misi HADR dan diplomasi pertahanan secara efektif (Rahman, 2022; Till, 2022).

Lebih lanjut, LHD dan LHA juga memiliki karakter *dual-use*, yaitu dapat berfungsi sebagai aset tempur terbatas

sekaliplatform diplomasi kemanusiaan. Pengoperasian helikopter serbu dan pesawat *short take-off and vertical landing* (STOVL) memungkinkan kapal jenis ini berkontribusi pada stabilitas kawasan tanpa memicu eskalasi militer yang berlebihan, sehingga relevan dalam konteks keamanan maritim Asia Tenggara dan Indo-Pasifik (Bateman, 2023; ASEAN, 2023).

Perkembangan teknologi militer turut mengubah cara kapal induk dan platform laut lainnya dioperasikan. Integrasi *unmanned systems*, baik *unmanned aerial vehicles* (UAV), *unmanned surface vehicles* (USV), maupun *unmanned underwater vehicles* (UUV), memperluas jangkauan pengawasan, pengintaian, dan serangan tanpa meningkatkan risiko terhadap personel. Kapal induk modern semakin berfungsi sebagai pusat operasi jaringan (*network-centric warfare*), di mana sistem berawak dan nirawak beroperasi secara terintegrasi sebagai *force multiplier* (IISS, 2023; Till, 2022).

Di sisi lain, dominasi kapal induk menghadapi tantangan serius dari strategi *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD). Negara-negara dengan kepentingan defensif regional

mengembangkan sistem misil jarak jauh, pertahanan udara berlapis, kapal selam, serta sensor maritim canggih untuk membatasi kebebasan manuver kekuatan laut lawan. Dalam konteks ini, kapal induk dipandang sebagai *high-value asset* yang rentan terhadap serangan asimetris dan presisi tinggi (Hosoda, 2024; IISS, 2023).

Kerentanan tersebut semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi misil hipersonik yang memiliki kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang sulit diprediksi. Kehadiran misil hipersonik mempersempit waktu respons sistem pertahanan kapal induk dan menantang asumsi tradisional mengenai dominasi dan kontrol laut. Akibatnya, peran kapal induk dalam konflik antar kekuatan besar cenderung bergeser dari alat tempur garis depan menjadi instrumen deterrence dan kehadiran strategis yang beroperasi pada jarak yang lebih aman dari zona konflik utama (Till, 2022; Hosoda, 2024).

Dengan demikian, kapal induk dalam strategi kekuatan laut modern tidak dapat dipahami secara statis. Nilainya tidak hanya terletak pada kemampuan tempurnya, tetapi juga pada fleksibilitas operasional, nilai simbolik, serta kontribusinya terhadap diplomasi,

deterrence, dan stabilitas regional. Evolusi menuju kapal induk ringan, platform amfibi multiguna, serta integrasi sistem nirawak menunjukkan bahwa konsep kapal induk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan teknologi perang laut kontemporer (Till, 2022; Rahman, 2022).

Meski begitu, kapal Induk bukanlah kapal yang harus dipunyai oleh negara. Kapal Induk sendiri memiliki kerugian yang dimana sangat menghambat negara-negara dunia ketiga dalam mengoperasikannya. Yaitu masalah Dana awal dan dana operasi. Dana untuk melakukan riset dan melakukan pembangunan kapal jenis kapal induk sangatlah mahal. Dengan contoh kapal induk terbaru yang sedang dibangun oleh Amerika Serikat, kelas Gerald R. Ford, Amerika Serikat menggelontorkan dana sebesar 37 miliar dolar Amerika dengan harga pembangunan satu kapal adalah sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat. Bukannlah sebuah dana yang sedikit untuk negara dunia ketiga. Selain itu, dengan munculnya kapal induk di Indonesia, negara-negara Australia dan Cina akan sangat terganggu dikarenakan munculnya sebuah kapal yang menjadi

poros kekuatan Asia Tenggara. Menjadikan adanya ketegangan antar negara Asia Tenggara dengan negara besar.

## Penutup

Dengan melihat dinamika maritim kontemporer, yang ditandai oleh pergeseran geopolitik ke kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya ketergantungan ekonomi global terhadap stabilitas *Sea Lines of Communication* (SLOC), serta laut sebagai *global commons*, menempatkan kekuatan laut dan diplomasi maritim sebagai instrumen strategis yang semakin relevan. Dalam konteks tersebut, kapal induk dalam strategi kekuatan laut modern tidak lagi semata dipahami sebagai alat tempur konvensional, melainkan sebagai instrumen multidimensional yang menggabungkan fungsi proyeksi kekuatan, deterrence, kehadiran strategis, dan diplomasi, meskipun pada saat yang sama menghadapi tantangan serius dari perkembangan *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) dan teknologi misil hipersonik. Bagi Indonesia, yang mengusung visi Poros Maritim Dunia dan beroperasi dalam lingkungan strategis yang lebih menekankan stabilitas kawasan serta diplomasi, kapal induk tidak dapat

diposisikan sebagai kebutuhan pertahanan yang mendesak, melainkan sebagai instrumen diplomasi maritim yang bersifat opsional-strategis, khususnya dalam bentuk kapal induk ringan atau platform amfibi multiguna, yang relevansinya terletak pada nilai simbolik, fleksibilitas operasional, serta kontribusinya terhadap citra dan peran Indonesia sebagai aktor maritim yang aktif dan bertanggung jawab di kawasan Indo-Pasifik, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

## Sumber Pustaka

- ASEAN. (2023). *ASEAN outlook on the Indo-Pacific: Implementation report 2023*. ASEAN Secretariat.
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan negara dan postur TNI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bateman, S. (2023). Maritime security and naval diplomacy in the Indo-Pacific. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 147–165.
- Bercuson, D. J. (1942). *The battle of the Atlantic*. Toronto: University of Toronto Press.
- Berridge, G. R., & James, A. (2003). *A dictionary of diplomacy* (2nd ed.). London: Palgrave Macmillan.

- Booth, K. (2014). *Navies and foreign policy*. London: Routledge.
- Bueger, C. (2021). *Maritime security*. Cambridge: Polity Press.
- Chang, F. K. (2018). Naval diplomacy and maritime strategy. *Naval War College Review*, 71(3), 45–62.
- Ebegbulem, J. C., & Adams, C. (2022). Diplomacy and national security in a globalized world. *Journal of International Relations*, 10(1), 1–15.
- Global Review. (2013). Minimum essential force dan modernisasi pertahanan Indonesia. *Global Review*, 5(2), 22–30.
- Hallion, R. P. (2001). *Taking flight: Inventing the aerial age*. Oxford: Oxford University Press.
- Hart, P., & Siniver, A. (2020). *Diplomacy: Theory and practice*. London: Routledge.
- Heiduk, F., & Wacker, G. (2021). From Asia-Pacific to Indo-Pacific: Significance, implementation and challenges. *German Institute for International and Security Affairs Research Paper*, 1–28.
- Heine, J. (2006). On the manner of practising the new diplomacy. *Centre for International Governance Innovation Working Paper*, 11.
- Hosoda, T. (2024). Great power rivalry and maritime security in the Indo-Pacific. *Asian Security*, 20(1), 1–18.
- International Institute for Strategic Studies. (2023). *The military balance 2023*. London: IISS.
- JMOL. (2014). Indonesia's naval doctrine and green water navy orientation. *Journal of Maritime and Oceanic Law*, 6(1), 55–70.
- Kaufman, S. (1990). Arms control and the Washington naval treaty. *Diplomatic History*, 14(2), 145–167.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan kelautan Indonesia*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Buku putih pertahanan Indonesia 2021*. Jakarta: Kemhan RI.
- Khadafi, M., Prakoso, L. Y., & Sari, D. (2023). Naval diplomacy as an instrument of foreign policy. *Journal of Defense Studies*, 7(2), 89–104.
- Mehmood, T., & Khan, S. (2022). Diplomacy and deterrence in

